



PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DPPAKB)
KOTA BATAM TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 dan menyesuaikan kepada matriks RENSTRA 2021-2026 yang memasuki tahapan progress penyusunan lebih lanjut.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, Juli 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam


Umiyati, S.E
NIP. 19621027 198503 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
------------------------	----------

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 7

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 50

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	54
3.3. Program dan Kegiatan.....	59

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 71

BAB V. PENUTUP 87

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, serta mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga Negara tidak ada kecualinya, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, kemudian adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dimana dari latar belakang undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamanatkan disetiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga organisasi pemerintahan sangat diperlukan, dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam telah

diberikan mandat dan wewenang untuk membuat program kebijakan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka latar belakang dibuatnya renja adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan bernegara secara terus menerus yang berkesinambungan, dan dalam melaksanakan otonomi daerah perlu dilaksanakan beberapa hal; **pertama** memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan nasional secara optimal dan memadai sesuai tuntutan umum dari masyarakat agar aparat pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. **Kedua** pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum terutama untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejahtera, maka kedudukan peran perempuan perlu mendapat perhatian, ditingkatkan terus dan dikedepankan terutama di tingkat Kabupaten/Kota karena perempuan merupakan salah satu unsur komponen dari bagian masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan, Rendahnya pendidikan yang dimiliki kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemerintahan maupun legislatif hal ini selanjutnya akan berdampak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan RENJA ini adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan

- Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
 - 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
 - 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional
 - 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah Batam.
 - 9) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 10) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 15) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 16) Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 17) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 18) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
- 21) Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 22) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022
- 23) Perwako Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

- a. Sinkronisasi antara RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Renja dengan mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur dan pedoman kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan.
- e. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada didalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya, dan sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 – 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum juga bagaimana Sistematika Penulisan Renja ini.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.

Pada bab II ini diuraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab III ini berisikan tentang Tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN

Pada bab IV ini diuraikan tentang Program, kegiatan, Indikator kinerja, adanya tujuan dan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam yaitu.

- a. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga
- b. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Kedua sasaran yang ingin dicapai tersebut, pada Tahun 2020, dituangkan melalui 11 kegiatan mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020, maka digambarkan capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA DP3APPKB

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2021 Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pemerintahan										
1.02. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
1.02.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1.02.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1.02.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.02.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi	Tersedianya administrasi perkantoran selama 1 tahun	100	100	100	100	100	100	50	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perkantoran									
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.02.02.01.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100	100	100	100	100	100	50%	50%
1.02.02.02.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100	-	-	-	-	-	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.15	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan									
1.02.02.15.01.	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	peningkatan wawasan kader dan pengurus PKK Kota Batam	77 TIM PKK	77 TIM PKK	77 TIM PKK	77 TIM PKK	100	77 TIM PKK	77 Tim	50%
1.02.02.15.02.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan pelatihan perempuan berkepribadian dan Hebat Politik	3 ORGANISASI WANITA	3 ORGANISASI WANITA	3 ORGANISASI WANITA	3 ORGANISASI WANITA	100	3 ORGANISASI WANITA	3 Organisasi	35%
1.02.02.15.03.	Kegiatan Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan anggaran yang responsif	15 OPD (9.5%)	15 OPD (9.93%)	15 OPD (7.5%)	15 OPD (11.43%)	100	15 OPD (8.5%)	10%	10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kelembagaan PUG	gender								
1.02.02.15.04.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	300	150	250	250	100	300	50%	50%
1.02.02.15.06.	Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak	Persentase Pembaharuan Data Gender dan Anak Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	86%	86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.16.	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak									
1.02.02.16.01.	Kegiatan Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Pengaduan atau Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%	45%
1.02.02.16.07.	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam	Capaian Skor Kota Layak Anak	750	630.02	650	700	107.6%	700	335	45%
1.02.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.08.15	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga									
1.02.08.15.03.	Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	1000	1000	1000	1000	100	1000	220	22%
1.02.08.15.09.	Kegiatan Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	12 Balai Penyuluhan KB	100%	12 Balai Penyuluhan KB	12 Balai Penyuluhan KB	100	12 Balai Penyuluhan KB	50%	50%
1.02.08.15.12.	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	12 Kecamatan	100%	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	12 Kecamatan	28%	28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penggerakan Kampung KB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/DAK NON FISIK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	13 Kampung KB	-	13 Kampung KB	13 Kampung KB	100%	13 Kampung KB	25%	25%
	Pembinaan Program KKBPK, Distribusi Alkon dan Manajemen BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/DAK NON FISIK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	128 orang	-	128 orang	128 orang	100%	128 orang	35%	35%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
					Target 2020	Realisasi 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.08.15.	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja	Jumlah anggota kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	268 Kel	249 Kel	262Kel	327Kel	127.7%	268 Kel	10%	10%
1.02.08.15.	Kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Jumlah tenaga lini lapangan yang didayagunakan	396 Orang	204 Orang	332	332	100	396 Orang	0	0
1.02.08.15.	Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Pemutakhiran Data KKBP	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	90%	70%	-	-	-	-	0	0

Penjelasan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini mengalami pengaruh yang signifikan akibat dari pandemic covid-19 yang terjadi saat ini. Kegiatan yang berbasis pertemuan kepada masyarakat baru terlaksana pada periode akhir triwulan II (kedua) atau sekitar bulan Juni Tahun 2020 dengan mempedomani protokol kesehatan yang sangat ketat. Khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan muatan dan substansi kegiatan banyak yang bersifat sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat yang tentunya mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendati demikian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2020 program dan kegiatan tetap berjalan dan diupayakan dengan optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

a. Program Peningkatan Peran Serta, dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Melalui Program Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup, dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022

untuk memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial.

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam upaya pencapaian Keluarga harmonis dan sejahtera. Terdapat 77 kelompok PKK yang tersebar di kelurahan-kelurahan Kota Batam yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program PKK tahun 2020. 77 Tim kelompok PKK tersebut mendapatkan Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan pengurus PKK sebanyak 500 orang yang bertujuan untuk meningkatkan moral dan spiritual perempuan dalam keluarga. Untuk tahun 2020 kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi fisik kegiatan ini 80%, dengan realisasi keuangan 53.89%. Hal ini dikarenakan sejumlah kegiatan melibatkan masyarakat banyak tidak dapat dilaksanakan di ruang tertutup (Hotel) sesuai pagu yang telah dianggarkan sehingga anggaran tidak terserap maksimal.

2. Pembinaan Organisasi Perempuan

Untuk tahun 2020 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik melalui penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu yang disejalankan dengan Serasehan Organisasi Perempuan Kota Batam yang dihadiri oleh 250 orang peserta dari masyarakat dan organisasi perempuan se-kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di berbagai bidang sektor kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat. Dalam upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi kaum perempuan juga dilaksanakan pelatihan tata rias bagi 750 orang ibu rumah tangga se-kota Batam. Capaian fisik kegiatan ini adalah 75 % dengan realisasi anggaran sebesar 65.76%. Anggaran pada kegiatan ini juga tidak terserap maksimal karena kegiatan talkshow Peningkatan Wawasan Perempuan yang melibatkan masyarakat banyak pada kondisi pandemi ini tidak dapat dilaksanakan.

3. **Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak**
Ketersediaan data Gender dan Anak merupakan salah satu indikator pencapaian Kota Layak Anak. Oleh karena itu melalui kegiatan ini pada tahun 2019 telah di luncurkan 1 sistem aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA). Diharapkan melalui aplikasi ini dapat dibangun keselarasan dan keterpaduan data pengarusutamaan Gender dan anak dalam pelaksanaan Kegiatan OPD se-Kota Batam. Pada tahun 2020 kegiatan ini telah terlaksana melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan Aplikasi Data Gender dan Anak yang menjadi pedoman penyusunan GAB/GBS program dan kegiatan. Secara umum kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. dan capaian realisasi keuangan sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

1. **Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Melalui Kegiatan ini telah dilaksanakan Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Demikian halnya pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berjumlah 184 kasus sepanjang tahun ini dapat tertangani dengan baik. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. Untuk capaian realisasi keuangan sebesar 92,22%

2. Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan /Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun 2020 telah terbentuk Forum Anak Kecamatan sebanyak 3 Kecamatan (Batu Aji, Sekupang, Sagulung). Demikian halnya KPPAD Kota Batam yang menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. Untuk capaian realisasi keuangan sebesar 100%.

c. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

1. Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)

Pada tahun 2020 kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan sarana dan prasarana dalam upaya mendukung keberhasilan program KB di Kota Batam. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Obgyn bed, implant removal dan IUD KIT masing-masing sebanyak 18 set yang diserahkan kepada klinik layanan KB Pemerintah dan swasta se-Kota Batam;
- b. Pengadaan meubelair, teralis, layar proyektor untuk gedung penyuluhan KB kecamatan Sekupang dan Belakang Padang;
- c. Pengadaan Personal Computer, Printer, Modem untuk Balai Penyuluhan KB di 9 kecamatan Kota Batam;
- d. Pengadaan Genre Kit untuk PIK-R, Laptop dan Infocus bagi petugas pencatatan dan pelaporan KB sebanyak masing-masing 18 unit.

Diharapkan melalui ketersediaan sarana prasarana ini pelaksanaan program kependudukan melalui pelayanan KB di kota Batam dapat terlaksana dengan progress yang berkesinambungan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini telah terlaksana sangat baik dengan realisasi fisik 100%

dari pagu anggaran sebesar Rp 1.176.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 1.081.520.160,- (91.93%)

2. Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (Bantuan Operasional/ DAK Non Fisik)

Kegiatan ini mencakup penyediaan fasilitas di balai penyuluhan KB di 12 kecamatan se-kota Batam yaitu : Belanja rutin air listrik, jaringan internet, pengadaan ATK bagi petugas penyuluhan KB. Melalui kegiatan ini juga dilaksanakan Penyuluhan kesehatan reproduksi di 12 kecamatan, pelatihan pencatatan dan pelaporan KB bagi kader SUBPPKBD di 12 kecamatan, Penyuluhan satuan karya 9 kecamatan serta pembinaan kader dalam sosialisasi aplikasi Monika dan Sirika untuk bidan Puskesmas dan klinik KB swasta. Kegiatan ini terlaksana dengan capaian fisik 75 % dengan serapan anggaran yang terealisasi sebesar 51.11 %. Beberapa substansi dari kegiatan ini juga tidak dapat terlaksana karena insentitas pertemuan yang melibatkan masyarakat juga dikurangi. Dan alokasi anggaran transportasi bidan PNS tidak dapat dibayarkan sesuai aturan Perwako Kota Batam bahwa PNS tidak boleh menerima uang transportasi kegiatan.

3. Penggerakan Kampung KB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/DAK Non Fisik)

Dalam upaya meningkatkan akselerasi dan percepatan pelaksanaan program Kependudukan

keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK) maka dilaksanakan kegiatan berbasis masyarakat yang melibatkan stakeholder dan komponen masyarakat. Muatan kegiatan ini pada umumnya adalah pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat luas yang berupaya memberikan pemahaman dan membangun konsep/ mindset masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan keluarga terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan keluarga. Namun pada masa pandemi ini progress kegiatan ini terdampak secara signifikan karena kegiatan ini baru dilaksanakan pada awal bulan Juli 2020 dan intensitas pertemuan tidak terlaksana maksimal karena pandemic covid-19. Yang terlaksana sampai dengan akhir Desember 2020 meliputi : Pertemuan Pokja Kampung KB 3 kali, Forum Masyarakat 14 Kali, Lokakarya Mini 12 kali , Orientasi Kader Kampung KB 3 kali , Pertemuan Poktan Ketahanan Keluarga 23 kali.

Secara garis besar pertemuan dan sosialisasi ini hanya terlaksana sekitar 50 % dan sangat jauh dari capaian yang diharapkan. Namun demikian kegiatan ini progresnya dapat ditingkatkan kembali pada tahun anggaran 2021. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi anggaran 29.88 % dan fisik kegiatan sebesar 50 %.

4. Pembinaan Program KKBPK, Distribusi Alkon dan Manajemen BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/DAK Non Fisik)

Kegiatan ini berupa pembinaan bagi kader KKBPK yang meliputi PLKB, PPKBD dan SUBPPKBD di 12 kecamatan Kota Batam. Kader KB yang telah di tunjuk diberikan pelatihan dan pembinaan untuk mengoptimalkan strategi pelayanan KB di lapangan. Demikian halnya melalui kegiatan ini juga dilaksanakan distribusi obat dan alat kontrasepsi bagi 85 klinik KB Pemerintah dan swasta se kota Batam.

Pada pelaksanaannya kegiatan ini secara fisik tercapai sebesar 90 % dan realisasi anggaran 72.02%. Anggaran pada kegiatan ini pun tidak terserap maksimal karena jarak penjangkauan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke puskesmas maupun klinik KB swasta di kota Batam tidak terlalu jauh dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran distribusi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedia dan terpenuhinya administrasi perkantoran selama 1 tahun sehingga dapat meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin/tahunan yang bersifat administrative yang mendukung pelaksanaan semua kegiatan setiap tahunnya.

Capaian kegiatan ini secara fisik sebesar 100 % dengan serapan realisasi anggaran sebesar 91.30%. Secara umum kegiatan ini terlaksana dengan baik.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun melalui adanya service kendaraan bermotor, pergantian suku cadang kendaraan bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, dimana hal tersebut telah mendukung meningkatnya kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi anggaran 99.63%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94.53	94.54	94.44	94.46	94.42	40.50	94.44	94.46	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			59.5	61.05	58.45	58.50	58.40	21.0	58.45	58.50	
	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)			73.5	74	80.50	81.00	84.02	60%	80.50	81.00	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Mutu dan kapasitas SDM perempuan yang belum memadai perlu diberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan
4. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
5. Kasus trafiking yang rentan karena geografis Kota Batam sebagai daerah border/transit antar negara.
6. Masih belum optimalnya fungsi lembaga P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standard ketersediaan sarana/prasarana
7. Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak mencapai tingkat Madya namun perlu pembenahan dalam penyediaan layanan dan sarana/prasarana tumbuh kembang anak secara holistic integrative
8. Kasus-kasus kekerasan terhadap Anak cukup tinggi termasuk penelantaran dan kekerasan seksual
9. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi, sehingga meningkatkan pertumbuhan penduduk

10. Masyarakat Daerah hinterland perlu mendapat akses terbuka luas dalam pelayanan dan peningkatan akseptor KB

11. Masih tingginya Unmetneed KB.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kode	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
2				Usuran Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							Usuran Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100%	11.943.039.996,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				100%	10.213.725.737,00
2	8	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	100%	7.743.629.436,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	100%	8.063.544.562,00

						2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	100%	92.000.000,00		Jumlah Bahan Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi SKPD yang dilaksanakan	2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	100%	90.120.000,00	
2	8	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	100%	10.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	100%	9.978.420,00	
						2.08.01.2.06.02 Penyediaan	Kota Batam	100%	147.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	2.08.01.2.06.02 Penyediaan	Kota Batam	100%	70.210.330,00	

					Peralatan dan Perlengkapan Kantor					pan Kantor yang disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	100%	57.000.000,00		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	100%	4.051.420,00	
					2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	100%	52.000.000,00		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Tersedianya makanan dan minuman	2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	100%	11.178.000,00	

						2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Batam	100%	15.000.000,00		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Batam	100%	15.120.700,00	
						2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	100%	425.000.000,00		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Batam	100%	194.325.000,00	
2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok	2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	100%	750.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	100%	790.496.500,00	

					dan fungsi perangkat daerah											
2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	100%	47.048.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	100%	80.420.400,00	
						2.08.012.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	100%	549.284.960,00		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2.08.012.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	100%	553.290.400,00	
2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya administrasi perkantoran yang	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Batam	100%	45.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jasa pemeliharaan rutin berkala	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Batam	100%	79.060.000,00	

				Daerah	menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				n Daerah	mobil jabatan yang disediakan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	100%	62.077.200,00		Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	100%	203.540.000,00		

										n					
					2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	100%	48.000.000,00		Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	100%	48.390.000,00	
					2.08 01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	100%	1.900.000.000,00		Jumlah Gedung/Bangunan yang dipelihara dan direhabilitasi	2.08 01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	

2	08			Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94.54	580.000.000,00	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94.54	1.533.897.750,00
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	15 OPD	260.000.000,00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	15 OPD	249.997.750,00
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	Kota Batam	3 Organisasi	320.000.000,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	Kota Batam	3 Organisasi (250 orang)	1.283.900.000,00

				ta	an Berkepribadian dan Hebat	Sosial, dan Ekonomi				atan Kewenangan Kabupaten/Kota	Berkepribadian dan Hebat Politik (seminar kepribadian, lomba hari ibu, sarasehan organisasi)	Sosial, dan Ekonomi				
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan		Kota Batam	100%	550.851.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan		Kota Batam	100%	541.958.590,00	
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegah	Kota Batam	100%	550.851.000,00	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang dilayani oleh unit	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegah	Kota Batam	100%	359.999.590,00	

					n terpadu	an Kekerasa n terhadap Perempu an Lingkup Daerah Kabupate n/ Kota					pelayana n terpadu	an Kekerasa n terhadap Perempu an Lingkup Daerah Kabupate n/ Kota				
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempu an yang difasilitasi oleh unit pelayana n terpadu	Koordinas i dan Sinkronisa si Pelaksana an Penyedia an Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempu an Korban Kekerasa n Wewenan g Kabupate n/Kota	Kota Batam	100 %	182.054.000,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempu an yang difikasitas i oleh unit pelayana n terpadu	2.08.03.2. 02.02Koo rdinasi dan Sinkronisa si Pelaksana an Penyedia an Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempu an Korban Kekerasa n Wewenan g Kabupate n/Kota	Kota Batam	100 %	181.959.000,00	

2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks pemberdayaan Gender		Kota Batam	61.05	1.750.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Kota Batam	61.05	1.825.658.250,00	
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se Kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	700 Orang	1.750.000.000,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se Kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	700 Orang	1.825.658.250,00	
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94.54	140.858.956,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	Indeks Pembangunan Gender	Kota Batam	94.54	191.998.790,00	

2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbarui	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	140.858.956,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang difasilitasi pembahasan data gender dan anak	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	191.998.790,00
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	620.000.000,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	651.132.740,00
2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	HAN Kota Batam, Pembentukan Kelurahan Layak Anak, Terfasilitasi	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan	Kota Batam	100%	620.000.000,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah lembaga Layanan Anak yang dievaluasi dan	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan	Kota Batam	100%	651.132.740,00

				Kabupaten/Kota	simya kegiatan KPPAD Kota Batam	Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota	diberikan sosialisasi pemenuhan hak anak	Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	450.000.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	367.367.000,00	
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindakan Kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	450.000.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak atau laporan yang dilayani	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	52.166.200,00	

2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban tindak kekerasan terhadap anak yang difasilitasi oleh unit pelayanan terpadu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	315.201.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak yang difasilitasi oleh unit pelayanan terpadu	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	315.201.000,00	
2	14			Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Contaseptive Prevalance Rate		Kota Batam	74.00	120.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Contaseptive Prevalance Rate		Kota Batam	74.00	175.000.000,00	
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Tersusnya Dokumen GDPK	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan	Kota Batam	1 Buku	120.000.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Jumlah dokumen grand design	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan	Kota Batam	1 Buku	175.003.200,00	

				Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Batam	Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	yang berbasis kependudukan /Jumlah OPD yang menerima rekomendasi implementasi GDPK	Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contaseptive Prevalance Rate		Kota Batam	74.00	4.953.010.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contaseptive Prevalance Rate		Kota Batam	74.00	5.856.078.800,00	

2	14	03	2.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	1.000 PUS	321.000.000,00	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang mengikuti penyuluhan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	1.000 PUS	420.999.800,00		
					Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	128 Orang	1.667.000.000,00			Jumlah Balai KB yang dipenuhi sarana/prasarana	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	128 Orang	173.747.000,00	
					Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Batam	12 Balai KB	1.190.000.000,00			Jumlah Balai KB yang difasilitasi biaya operasional dipenuhi sarana/pr	2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Batam	12 Balai KB	872.784.000,00	

											asarana					
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang Didayagunakan	Pembinaan IMP dan Program KKBP di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	396 Orang	175.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang dibina	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBP di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	402 Orang	185.000.000,00	
					Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	12 Balai KB	307.200.000,00		Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	12 Balai KB	307.200.000,00	
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	Kota Batam	12 Kecamatan	198.475.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Kota Batam	12 Kecamatan	198.476.000,00	

						Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				Kabupaten/ Kota		Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
					Ketersediaan Sarana dan Prasarana KB	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	12 Kecamatan	591.369.000,00		Ketersediaan Sarana dan Prasarana KB	2.14.03.2.03.03Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	12 Kecamatan	591.200.000,00	
					Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	12 Kecamatan	980.000.000,00		Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	12 Kecamatan	2.506.000.000,00	
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Kota Batam	13 Kampung KB	600.672.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.03.2.04.03Pelaksanaan dan Pengelolaan	Kota Batam	13 Kampung KB	600.672.000,00	

				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		KKBPK di Kampung KB				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		an Program KKBPK di Kampung KB				
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Contaseptive Prevalance Rate		Kota Batam	74.00	210.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Contaseptive Prevalance Rate	Kota Batam	74.00	955.938.900,00	
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Pengembangan kelompok ketahanan keluarga, keluarga, BKB, HI, BKR, BKL, UUPKS, PIK Remaja/Genre dan Saka Kencana	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	Kota Batam	278 Orang	210.000.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	Kota Batam	278 Orang	354.594.900,00	

					Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	12 Kecamatan	0		Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	12 Kecamatan	601.344.000,00	
				TOTAL					21.317.759.952,00	TOTAL					22.312.759.952,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL T-C. 32

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	cat
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN

3.3.1.1. Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.3.1.2. Renstra BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki visi menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”,

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten, serta 5) Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan

Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan

reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam upaya perwujudan misi yang kemudian dijabarkan melalui rencana kerja yang strategis, yang bertujuan untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada dalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya.

3.2.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 , **Visi Kota Batam** adalah ***Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.***

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Visi :

“Terwujudnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”

3.2.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas P3APPKB Kota Batam Batam sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
2. Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

3.2.3. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk selama lima tahun kedepan.

Tujuan dalam hal ini adalah suatu bentuk pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan menjelaskan arah keinginan yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam antara sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak;
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
5. Meningkatkan Keberdayaan keluarga.

Tujuan dalam hal ini adalah merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan ini tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini realistis dan dapat diharapkan dapat dicapai, oleh karena itu maka berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan tersebut yakni; diimplementasikan dengan cara lebih operasional dari masing-masing misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah ditetapkan, dan untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan, kemudian disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis secara umum di Kota Batam.

3.2.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan sebagaimana diuraikan diatas yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam atau kelompok sasaran yang akan dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Langkah yang diperlukan dalam perumusan sasaran adalah dengan mereview pernyataan tujuan pelayananjangkamenengah yang telah dirumuskan; kemudian mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam; merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan (*key performance indicator*) dari penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam; dan memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Untuk merumuskan sasaran perlu diperhatikan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dan indikator kinerja urusan yang menjaditugasdanfungsi ataupun kelompok sasaran yang dilayani antara lain;

- 1) Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender;
- 2) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan;
- 3) Berkurangnya kasus-kasus anak;
- 4) Meningkatnya capaian Kota Layak Anak;
- 5) Menurunnya pertumbuhan penduduk;
- 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB;
- 7) Meningkatnya keaktifan kelompok Tribina Keluarga, UPPKS dan PIK-KRR.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 :

Table T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021, Perkiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Cat. Penting	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
2			Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2	0 8 0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kota Batam	100%	10.213.725.732,00	Kota Batam	
2	0 8 0 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	1 Tahun	8.063.544.562,00	1 Tahun	8.100.000.000,00
				Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan OPD	2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kota Batam	1 Tahun	90.120.000,00	1 Tahun	110.000.000,00

						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
2	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	1 Tahun	9.978.420,00	100%	10.000.000,00	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	1 Tahun	70.210.330,00	1 Tahun	500.000.000,00	
					Indikator Tersedianya peralatan rumah tangga	2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	1 Tahun	4.051.420,00	1 Tahun	57.000.000,00	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya makanan dan minuman	2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	1 Tahun	11.178.000,00	1 Tahun	52.000.000,00	
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	1 Tahun	15.120.700,00	1 Tahun	18.000.000,00	
					Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Batam	1 Tahun	194.325.000,00	1 Tahun	425.000.000,00	

2	0	0	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	1 Tahun	790.496.500,00	1 Paket	250.000.000,00	
2	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	1 Tahun	80.420.400,00	1 Tahun	47.048.000,00	
					Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	1 Tahun	553.290.400,00	1 Tahun	570.000.000,00	
2	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	1 Tahun	79.060.000,00	1 Tahun	45.000.000,00	
					Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kota Batam	1 Tahun	203.540.000,00	1 Tahun	62.077.200,00	

						Dinas Operasional atau Lapangan						
					Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	1 Tahun	48.390.000,00	1 Tahun	50.000.000,00	
2	0			Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	0	0		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94,54	249.997.750,00			
2	0	0	2.0	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	2 08 02 2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	15 OPD	249.997.750,00	44 OPD	260.000.000,00	
2	0	0		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender		Kota Batam	61,05	1.283.900.000,00		350.000.000,00	

2	0	0	2.0	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Hebat Politik (seminar kepribadian, lomba hari ibu, sarasehan organisasi)	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	3 Organisasi	1.283.900.000,00	250 Orang	350.000.000,00
2	0	0		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	541.958.590,00		
2	0	0	2.0	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	359.999.590,00	59 orang	330.000.000,00
2	0	0	2.0	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	Kota Batam	100%	181.959.000,00	18 orang	195.000.000,00

				Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	terpadu	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						
2	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender		Kota Batam	61,05	1.825.658.250,00			
2	0	0	2.0	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se Kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	700 Orang	1.825.658.250,00	750 orang	1.760.000.000,00	
2	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94,54	191.998.790,00			
2	0	0	2.0	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	191.998.790,00	44 OPD	170.858.956,00	

				Kabupaten/Kota								
2	0	0		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	651.132.740,00			
2	0	0	2.0	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	HAN Kota Batam, Pembentukan Kelurahan Layak Anak, terfasilitasinya kegiatan KPPAD Kota Batam	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	651.132.740,00	40 Lembaga	625.000.000,00	
2	0	0		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	367.367.200,00			
2	0	0	2.0	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	52.166.200,00	90 orang	52.180.000,00	

2	0	0	2.0	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	315.201.000,00	59 orang	315.201.000,00
2	1			Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	1	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		Kota Batam	74,00	175.003.200,00		
2	1	0	2.0	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya Dokumen GDPK Kota Batam	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	175.003.200,00	1 Dokumen	150.000.000,00

2	1	0		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		Kota Batam	74,00	5.856.078.800,00			
2	1	0	2.0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	1.000 PUS	420.999.800,00	1.000 PUS	325.000.000,00	
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	128 Orang	173.747.000,00	12 Balai KB	202.000.000,00	
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Batam	12 Balai KB	872.784.000,00	12 Balai KB	872.784.000,00	
2	1	0	2.0	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang Didayagunakan	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	396 Orang	185.000.000,00	408 orang	185.000.000,00	

					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	12 Balai KB	307.200.000,00	532 Orang	307.200.000,00	
2	1	0	2.0	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Kecamatan	198.476.000,00	100 Faskes	198.475.000,00	
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	12 Kecamatan	591.200.000,00	575 orang	591.369.000,00	
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	12 Kecamatan	2.506.000.000,00	75 Balai/ Klinik	980.000.000,00	

2	1	0	2.0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Batam	13 Kampung KB	600.672.000,00	15 Kampung KB	600.672.000,00
2	1	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		Kota Batam	74,00	955.938.900,00		
2	1	0	2.0	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Pengembangan kelompok ketahanan keluarga, BKB HI,BKR,BKL,UPPKS, PIK Remaja/Genre dan Saka Kencana)	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	278 Orang	354.594.900,00	288 Orang	210.000.000,00

				Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	12 Kecamatan	601.344.000,00	350 orang	605.000.000,00	
				TOTAL				22.312.759.952,00		19.541.865.156,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Namun demikian, dari sepuluh program tersebut terdapat 1 (satu) program yang merupakan program rutin Setiap OPD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sehingga yang menjadi program inti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ada 9 (Sembilan) yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Pengendalian Penduduk

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan, yaitu:
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dilaksanakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

- Pengolahan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
9. Program Pengendalian Penduduk
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan program berkaitan dengan Angka kekerasan pada Anak demikian juga kasus-kasus anak yang terlibat dalam hukum juga merupakan salah satu fokus pelaksanaan program ini, dengan demikian tercapainya mutu hidup yang berkualitas dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program ini.

Demikian halnya melalui Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya memperbaiki taraf hidup keluarga yang masih rendah dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas dan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi yang merata, Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, Meningkatkan kampanye pendewasaan usia perkawinan, menyediakan data primer tahapan keluarga di Kota Batam.

Tabel: 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022:

Program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa indikator kegiatan yang tertera pada Tabel 4.1, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
2			Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	08 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam	100%	10.213.725.732,00	
2	08 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	1 Tahun	8.063.544.562,00
				Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan OPD	2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	1 Tahun	90.120.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022

2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	1 Tahun	9.978.420,00
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	1 Tahun	70.210.330,00
					Indikator Tersedianya peralatan rumah tangga	2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	1 Tahun	4.051.420,00
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya makanan dan minuman	2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	1 Tahun	11.178.000,00
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	1 Tahun	15.120.700,00
					Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Batam	1 Tahun	194.325.000,00
2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	1 Tahun	790.496.500,00
2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Batam	1 Tahun	80.420.400,00

					Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	1 Tahun	553.290.400,00
2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	1 Tahun	79.060.000,00
					Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	1 Tahun	203.540.000,00
					Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	1 Tahun	48.390.000,00
2	08			Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94,54	249.997.750,00

2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	2 08 02 2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	15 OPD	249.997.750,00
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender		Kota Batam	61,05	1.283.900.000,00
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Hebat Politik (seminar kepribadian, lomba hari ibu, sarasehan organisasi)	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	3 Organisasi	1.283.900.000,00
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	541.958.590,00
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	Kota Batam	100%	359.999.590,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022

						Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	181.959.000,00
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender		Kota Batam	61,05	1.825.658.250,00
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader dan Pengurus PKK yang dibina se Kota Batam, Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	700 Orang	1.825.658.250,00
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender		Kota Batam	94,54	191.998.790,00

2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	191.998.790,00
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	651.132.740,00
2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Skor Kota Layak Anak	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	750	651.132.740,00
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan		Kota Batam	100%	367.367.200,00
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	52.166.200,00

2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	100%	315.201.000,00
2	14			Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		Kota Batam	74,00	175.003.200,00
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya Dokumen GDPK Kota Batam	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Buku	175.003.200,00
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		Kota Batam	74,00	5.856.078.800,00

	14	03	2.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	1.000 PUS	420.999.800,00
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	128 Orang	173.747.000,00
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Batam	12 Balai KB	872.784.000,00
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang Didayagunakan	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Batam	402 Orang	185.000.000,00
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	12 Balai KB	307.200.000,00
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Kota Batam	12 Kecamatan	198.476.000,00

				Kabupaten/Kota		Jaringan dan Jejaringnya			
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	12 Kecamatan	591.200.000,00
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	12 Kecamatan	2.506.000.000,00
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Batam	13 Kampung KB	600.672.000,00
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		Kota Batam	74,00	955.938.900,00

2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang aktif (Pengembangan kelompok ketahanan keluarga, BKB HI, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja/Genre dan Saka Kencana)	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	272 Orang	354.594.900,00
					Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Batam	12 Kecamatan	601.344.000,00
TOTAL									22.312.759.952,00

Sumber Dana

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 10 (sepuluh) program yang telah dispesifikasi yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Dengan pelaksanaan kesepuluh program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2022 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi *“Terwujudnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”* serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk periode berjalan yakni Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini selanjutnya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan – perbaikan seperlunya, sehingga secara umum dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat *“Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”*.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam**



Ummyati, S.E

NIP 19621027 198503 2 006



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BATAM

Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.III Batam Center; Telp/Fax. (0778) 470692 Batam
Email: bppakbbatam@gmail.com

Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor: 15/SK/DP3A-P2-KB/Sekr/XII/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 30 Desember 2020

 **KEPALA DINAS**

UMIYATI, SE
NIP. 19621027 198503 2 006

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DP3APKKB KOTA BATAM
TAHUN 2021**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM		
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENGARAH		
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB		
3	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	SEKRETARIS		
I.	PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ROYHANDY RIFANTO, S.Kom	19840830 201001 1 003	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	FERA DARMAANTI, S.IP	19870211 201101 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
3	NURUL YUNI, S.H	19740626 200212 2 005	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
4	Dra. TUTI ARYANTI	19740704 200003 2 004	Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	Anggota
II.	PEMENUHAN HAK ANAK			

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RAFEAH, S.Sos	19730115 200003 2 001	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
2	SRI YANTI, S.E, M.Si	19750210 200003 2 006	Kasi PHA di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Anggota
3	SRI RAHMI FITRIANTY, S.E	19691210 200212 2 008	Kasi PHA di Bidang Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
4	ULFI RAMAYANTI, S.ST	19680611 198801 2 003	Kasi PHA di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
III.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YOHANA RUMEKTI, S.E	19660516 198903 2 018	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	TENGGU KOMALASARI V, S.KM	19681210 198811 2 001	Kasi Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	HASRIATI, S.E	19741027 200901 2 004	Kasi Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota
4	TEDDY SUHANDI, S.IP	19810610 200801 1 011	Kasi Perlindungan Anak	Anggota
IV.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	LIBERTY LUCI PATIMANG, SKM	19711216 199803 2 008	Plt. Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Ir. INDAWATY WAKIDJO	19671102 199403 2 005	Kasi Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	LIBERTY LUCI PATIMANG, SKM	19711216 199803 2 008	Kasi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
4	EVI MURNI	19640515 198503 2 015	Kasi Pendistribusian Kebutuhan Alat, Obat Kontrasepsi	Anggota
IV.	KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YUSILFA YENNI, S.Pd	19630805 198401 2 003	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator
2	TIAMAN SITORUS, SE	19650822 198602 2 006	Kasi Bina Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga	Anggota
3	ISNAINI, S.Ag.	19660319 199803 2 002	Kasi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Anggota
4	IWAN KRISTIANTO, S.Psi	19780423 200604 1 010	Kasi Data dan Informasi Kependudukan KB & Pembangunan Keluarga	Anggota

Batam, 30 Desember 2020

KEPALA DINAS



UMIYATI, SE

NIP. 19621027 198503 2 006